

Reformasi Partai Politik dalam Memperkuat Demokrasi Indonesia Menuju Pemilu 2029: Tantangan, Strategi, dan Model PENTA Sebagai Kerangka Konseptual Penguatan Kelembagaan

Ngudi Astuti*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

Abstrak

Partai politik memainkan peran sentral dalam sistem demokrasi dengan berfungsi sebagai institusi yang menyediakan representasi politik, rekrutmen kepemimpinan, dan pendidikan kewarganegaraan. Namun, partai politik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan kelembagaan, termasuk lemahnya demokrasi internal, dominasi elite, keterbatasan transparansi dalam pembiayaan politik, belum optimalnya pengembangan kader, serta tata kelola organisasi yang belum efektif. Berbagai tantangan tersebut berkontribusi terhadap menurunnya kepercayaan publik dan melemahnya kualitas tata kelola pemerintahan yang demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan reformasi partai politik serta mengembangkan kerangka konseptual untuk memperkuat kelembagaan partai politik menuju Pemilihan Umum Tahun 2029. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji literatur akademik, kerangka hukum, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan partai politik, demokrasi, dan kelembagaan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi partai politik yang efektif memerlukan lima dimensi strategis, yaitu penguatan demokrasi internal, rekrutmen politik berbasis merit, pembiayaan politik yang transparan dan akuntabel, transformasi digital dalam tata kelola partai, serta pendidikan politik yang berkelanjutan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan Model PENTA (*Political Party Governance Strengthening Model*) sebagai kerangka konseptual yang mengintegrasikan kelima dimensi tersebut ke dalam strategi yang komprehensif untuk reformasi kelembagaan partai politik. Model PENTA menjadi kontribusi konseptual utama penelitian ini dengan menawarkan pendekatan terpadu untuk memperkuat tata kelola dan kelembagaan partai politik serta konsolidasi demokrasi di Indonesia menuju Pemilihan Umum Tahun 2029.

Kata Kunci: Reformasi partai politik, kelembagaan partai politik, demokrasi, Model PENTA, Pemilihan Umum 2029.

Abstract

*Political parties play a central role in democratic systems by serving as institutions for political representation, leadership recruitment, and civic education. However, political parties in Indonesia continue to face institutional challenges, including weak internal democracy, elite domination, limited transparency in political financing, inadequate cadre development, and ineffective organizational governance. These challenges have contributed to declining public trust and weakened the quality of democratic governance. This study aims to analyze the challenges of political party reform and develop a conceptual framework for strengthening party institutions toward the 2029 General Election. Employing a qualitative approach through library research, this study examines academic literature, legal frameworks, and relevant policy documents related to political parties, democracy, and institutionalization. The findings reveal that effective political party reform requires five strategic dimensions: strengthening internal democracy, merit-based political recruitment, transparent and accountable political financing, digital transformation of party governance, and sustainable political education. Based on these findings, this study proposes the PENTA Model (*Political Party Governance Strengthening Model*) as a conceptual framework that integrates these five dimensions into a comprehensive strategy for political party institutional reform. The PENTA Model represents the main conceptual contribution of this study by offering an integrated approach to strengthening party governance, institutionalization, and democratic consolidation in Indonesia toward the 2029 General Election.*

Keywords: *Political party reform, party institutionalization, democracy, PENTA Model, 2029 General Election*

PENDAHULUAN

Demokrasi modern tidak hanya ditentukan oleh

keberadaan pemilu yang kompetitif, tetapi juga oleh kualitas institusi politik yang mampu menjalankan fungsi representasi secara efektif.

© 2026 Perspektif Universitas jayabaya. All Right Reserved

Corresponding author: ngudiastuti12@gmail.com

Received 27 February 2026, Accepted 02 March 2026, Published 10 March 2026

Dalam sistem demokrasi, partai politik memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan negara melalui fungsi representasi politik, rekrutmen kepemimpinan, artikulasi kepentingan, serta pendidikan politik. Oleh karena itu, kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan partai politik dalam membangun organisasi yang demokratis, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan sosial politik (Dahl, 1998).

Reformasi politik tahun 1998 telah menghasilkan perkembangan demokrasi elektoral yang signifikan melalui penerapan sistem multipartai, kompetisi politik yang lebih terbuka, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses politik. Namun, perkembangan demokrasi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kelembagaan partai politik. Berbagai persoalan masih ditemukan dalam praktik kepartaian di Indonesia, seperti lemahnya demokrasi internal, dominasi elite dalam pengambilan keputusan, konflik kepengurusan, rendahnya kualitas kaderisasi, serta terbatasnya transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik (Mietzner, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara keberhasilan demokrasi secara prosedural dengan kebutuhan terhadap penguatan demokrasi substantif melalui institusi politik yang lebih kuat (Diamond, 1999).

Lemahnya kelembagaan partai politik memiliki implikasi terhadap kualitas demokrasi Indonesia. Partai politik yang belum memiliki tata kelola organisasi yang demokratis cenderung mengalami personalisasi kepemimpinan, ketergantungan terhadap figur tertentu, serta keterbatasan dalam membangun sistem kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan yang berkelanjutan (Panebianco, 1988). Selain itu, persoalan transparansi pendanaan dan lemahnya hubungan antara partai politik dengan masyarakat turut memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi politik (Scarrow, 2007). Dengan demikian, reformasi partai politik tidak dapat hanya dipahami sebagai upaya meningkatkan kemampuan elektoral, tetapi harus diarahkan pada penguatan kelembagaan yang mencakup demokrasi internal, profesionalisasi organisasi, transparansi, dan akuntabilitas (Huntington, 1968).

Memasuki periode pasca-Pemilu 2024 menuju Pemilu 2029, kebutuhan terhadap reformasi kelembagaan partai politik menjadi semakin penting. Perubahan lingkungan politik, perkembangan teknologi digital, meningkatnya tuntutan

keterbukaan publik, serta perubahan pola partisipasi masyarakat menuntut partai politik melakukan transformasi organisasi. Reformasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyempurnaan regulasi, tetapi juga membutuhkan penguatan demokrasi internal, rekrutmen politik berbasis merit, transparansi dan akuntabilitas pendanaan, digitalisasi tata kelola organisasi, serta pendidikan politik yang berkelanjutan (Katz & Mair, 2018).

Kajian mengenai reformasi partai politik telah banyak dilakukan oleh para peneliti dengan berbagai perspektif, seperti demokrasi internal, institusionalisasi partai, sistem kepartaian, rekrutmen politik, maupun tata kelola organisasi. Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan dinamika dan persoalan partai politik di Indonesia. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih membahas aspek-aspek tersebut secara parsial dan belum banyak menawarkan suatu kerangka konseptual yang mampu mengintegrasikan berbagai dimensi reformasi kelembagaan partai politik secara menyeluruh dalam menghadapi tantangan demokrasi menuju Pemilu 2029.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa terbatasnya kajian yang menghubungkan demokrasi internal, rekrutmen politik berbasis merit, transparansi pendanaan, digitalisasi tata kelola organisasi, dan pendidikan politik dalam satu model penguatan kelembagaan partai politik. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan integratif yang mampu menjelaskan hubungan antara tata kelola partai politik dan penguatan demokrasi.

Dengan demikian, reformasi partai politik menuju Pemilu 2029 perlu dipahami sebagai proses transformasi kelembagaan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas elektoral, tetapi juga pada pembangunan organisasi politik yang demokratis, profesional, transparan, dan adaptif terhadap perubahan sosial serta teknologi.

Konsep Partai Politik dan Reformasi Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu institusi utama dalam sistem demokrasi yang memiliki fungsi strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan negara. Fungsi tersebut mencakup representasi politik, artikulasi kepentingan, rekrutmen kepemimpinan, agregasi kepentingan, serta pendidikan politik masyarakat. Dalam perspektif demokrasi modern, keberadaan partai politik tidak

hanya dinilai berdasarkan kemampuan memenangkan kompetisi elektoral, tetapi juga berdasarkan kapasitas kelembagaannya dalam menjalankan fungsi demokrasi secara berkelanjutan (Katz & Mair, 1994). Namun, dalam perkembangan demokrasi kontemporer, partai politik menghadapi tantangan kelembagaan yang kompleks. Partai politik sering mengalami persoalan berupa dominasi *elite*, lemahnya demokrasi internal, ketergantungan terhadap figur tertentu, rendahnya kualitas kaderisasi, serta persoalan transparansi pendanaan politik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan demokrasi elektoral belum selalu diikuti oleh penguatan institusi partai politik (Scarrow, 2005).

Dalam perspektif institusionalisasi politik, Huntington menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi politik ditentukan oleh tingkat pelemagaan yang tercermin melalui kemampuan adaptasi, kompleksitas, otonomi, dan kohesi organisasi. Semakin tinggi tingkat institusionalisasi suatu organisasi politik, semakin besar kemampuannya dalam mempertahankan stabilitas dan keberlanjutan organisasi (Huntington, 1968). Sejalan dengan pandangan tersebut, Panebianco menegaskan bahwa kekuatan partai politik tidak hanya ditentukan oleh kemenangan elektoral, tetapi juga oleh kemampuan organisasi membangun struktur internal yang stabil, pembagian kewenangan yang jelas, serta mekanisme regenerasi kepemimpinan yang berkelanjutan (Panebianco, 1988).

Berdasarkan perspektif tersebut, reformasi partai politik tidak dapat dipahami hanya sebagai strategi peningkatan kapasitas elektoral, tetapi harus diarahkan pada penguatan tata kelola kelembagaan. Dengan demikian, reformasi partai politik membutuhkan pendekatan yang mencakup demokrasi internal, profesionalisasi organisasi, sistem kaderisasi, transparansi pendanaan, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan politik.

Demokrasi dan Demokrasi Internal Partai

Demokrasi pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pemilihan umum, tetapi juga berkaitan dengan keberadaan institusi politik yang mampu menjamin partisipasi, kompetisi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Dahl menjelaskan bahwa demokrasi membutuhkan adanya partisipasi politik yang luas dan kompetisi yang terbuka melalui institusi yang memungkinkan warga negara terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik (Dahl, 1971).

Dalam konteks partai politik, prinsip demokrasi tersebut perlu diterapkan melalui mekanisme internal organisasi. Demokrasi internal partai mencakup keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan, proses pemilihan kepemimpinan, penyusunan kebijakan organisasi, serta keterbukaan terhadap aspirasi anggota. Partai politik yang memiliki demokrasi internal yang kuat akan memiliki legitimasi organisasi yang lebih baik dibandingkan partai yang hanya bergantung pada keputusan *elite* (Scarrow, Webb & Poguntke, 2017).

Diamond menegaskan bahwa kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh efektivitas institusi politik dalam menjalankan fungsi representasi, akuntabilitas, dan keterbukaan. Oleh karena itu, demokrasi internal partai menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas kelembagaan partai politik (Diamond, 1999). Dalam penelitian ini, konsep demokrasi internal menjadi salah satu fondasi utama dalam merumuskan dimensi *Participation* dalam Model PENTA.

Institusionalisasi Partai Politik

Institusionalisasi partai politik menjelaskan kemampuan organisasi politik dalam membangun stabilitas, aturan internal, legitimasi, serta keberlanjutan organisasi. Huntington menjelaskan bahwa organisasi politik yang terinstitusionalisasi memiliki kemampuan adaptasi, kompleksitas, otonomi, dan kohesi yang tinggi (Huntington, 1968). Sementara itu, Panebianco menekankan bahwa partai politik yang kuat memiliki struktur organisasi yang stabil, tingkat profesionalisasi yang baik, serta mekanisme regenerasi kepemimpinan yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap figur tertentu (Panebianco, 1988).

Dalam konteks demokrasi Indonesia, persoalan institusionalisasi partai politik masih menjadi tantangan penting. Dominasi *elite*, lemahnya kaderisasi, konflik internal, serta rendahnya transparansi organisasi menunjukkan bahwa sebagian partai politik masih menghadapi persoalan dalam membangun kelembagaan yang kuat. Kondisi tersebut menyebabkan partai politik sering lebih berorientasi pada kepentingan elektoral jangka pendek dibandingkan pembangunan organisasi politik yang berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, penelitian ini melihat bahwa penguatan demokrasi tidak hanya bergantung pada mekanisme elektoral, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan partai politik. Oleh karena itu, penelitian ini mengem-

bangkan Model PENTA (Penguatan Tata Kelola Partai Politik) sebagai kerangka konseptual yang mengintegrasikan aspek demokrasi internal, rekrutmen politik berbasis merit, transparansi dan akuntabilitas pendanaan, digitalisasi tata kelola organisasi, serta pendidikan politik berkelanjutan sebagai strategi penguatan institusionalisasi partai politik menuju Pemilu 2029.

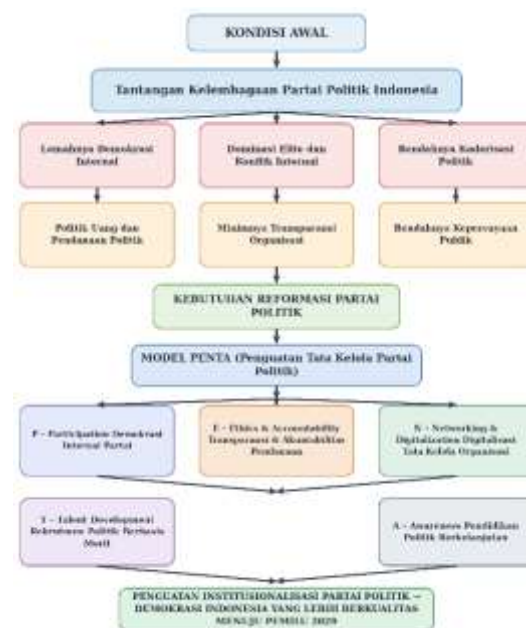
Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini mengembangkan Model PENTA (Penguatan Tata Kelola Partai Politik) yang mengintegrasikan lima dimensi utama, yaitu demokrasi internal, rekrutmen berbasis merit, transparansi dan akuntabilitas pendanaan, digitalisasi tata kelola organisasi, serta pendidikan politik berkelanjutan sebagai strategi penguatan kelembagaan partai politik menuju Pemilu 2029.

Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan partai politik. Berbagai persoalan seperti lemahnya demokrasi internal, dominasi elite, rendahnya kualitas kaderisasi, dan minimnya transparansi pendanaan menunjukkan perlunya reformasi kelembagaan.

Melalui sintesis teori demokrasi dan institusionalisasi partai politik, penelitian ini merumuskan Model PENTA sebagai kerangka konseptual yang menghubungkan lima dimensi penguatan tata kelola partai politik untuk mendukung konsolidasi demokrasi Indonesia menuju Pemilu 2029.

Sebagai bentuk kontribusi konseptual, penelitian ini menawarkan Model PENTA (Penguatan Tata Kelola Partai Politik) yang terdiri atas lima dimensi utama, yaitu: (1) demokrasi internal partai, (2) rekrutmen politik berbasis merit, (3) transparansi dan akuntabilitas pendanaan, (4) digitalisasi tata kelola organisasi, dan (5) pendidikan politik yang berkelanjutan. Kelima dimensi tersebut dipandang saling melengkapi dalam memperkuat kapasitas kelembagaan partai politik sehingga mampu meningkatkan kualitas representasi politik, memperkuat kepercayaan publik, dan mendukung konsolidasi demokrasi Indonesia menuju Pemilu 2029.



Gambar 1. Model Konseptual Penguatan Kelembagaan Partai Politik Menuju Pemilu 2029

Kerangka berpikir penelitian ini menempatkan penguatan kelembagaan partai politik sebagai prasyarat bagi peningkatan kualitas demokrasi Indonesia. Berbagai persoalan, seperti lemahnya demokrasi internal, dominasi *elite*, rendahnya kaderisasi, dan minimnya transparansi pendanaan, menjadi dasar perlunya reformasi partai politik. Reformasi tersebut dirumuskan melalui Model PENTA yang meliputi demokrasi internal, rekrutmen berbasis merit, transparansi pendanaan, digitalisasi tata kelola, dan pendidikan politik berkelanjutan. Kelima dimensi tersebut diharapkan memperkuat institusionalisasi partai politik serta mendukung demokrasi Indonesia menuju Pemilu 2029.

Berdasarkan berbagai perspektif teoritis tersebut, penelitian ini melihat bahwa penguatan demokrasi tidak hanya bergantung pada mekanisme elektoral, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan partai politik. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan Model PENTA sebagai kerangka konseptual yang mengintegrasikan aspek demokrasi internal, rekrutmen politik, transparansi pendanaan, digitalisasi organisasi, dan pendidikan politik sebagai strategi penguatan institusionalisasi partai politik."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*)

untuk menganalisis reformasi kelembagaan partai politik dalam memperkuat demokrasi Indonesia menuju Pemilu 2029. Pendekatan studi kepustakaan digunakan karena penelitian ini berfokus pada kajian konseptual melalui penelaahan berbagai sumber literatur yang relevan untuk membangun pemahaman teoritis terhadap suatu fenomena sosial politik (Creswell & Creswell, 2018).

Sumber data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta berbagai publikasi ilmiah yang berkaitan dengan partai politik, demokrasi, institusionalisasi politik, dan tata kelola organisasi politik.

Data penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu metode analisis yang dilakukan melalui proses identifikasi, kategorisasi, interpretasi, dan sintesis terhadap berbagai dokumen atau literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian (Krippendorff, 2018). Analisis ini digunakan untuk menemukan pola konseptual mengenai tantangan reformasi partai politik serta merumuskan dimensi penguatan kelembagaan yang menjadi dasar Model PENTA.

Pengembangan Model PENTA dilakukan melalui pendekatan *conceptual model building*, yaitu proses penyusunan kerangka konseptual berdasarkan sintesis teori, hasil penelitian terdahulu, dan identifikasi permasalahan empiris yang relevan (Whetten, 1989). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini mengintegrasikan berbagai perspektif mengenai demokrasi internal, institusionalisasi partai politik, rekrutmen politik, transparansi organisasi, transformasi digital, dan pendidikan politik ke dalam satu model penguatan kelembagaan partai politik.

Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya digunakan untuk mendeskripsikan persoalan reformasi partai politik, tetapi juga menghasilkan kontribusi konseptual berupa Model PENTA sebagai kerangka analisis penguatan kelembagaan partai politik Indonesia menuju Pemilu 2029.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Reformasi Partai Politik Indonesia Menuju Pemilu 2029

Pasca Reformasi 1998, partai politik menjadi aktor utama dalam proses demokratisasi Indonesia. Sistem multipartai memperluas partisipasi politik

masyarakat, sementara partai politik berperan tidak hanya sebagai peserta pemilu, tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik, artikulasi aspirasi, kaderisasi kepemimpinan, dan penghubung antara masyarakat dengan negara. Namun, perkembangan demokrasi elektoral di Indonesia belum diiringi oleh penguatan kelembagaan partai politik. Persoalan tata kelola, kaderisasi, transparansi pendanaan, dan dominasi *elite* menunjukkan bahwa tantangan demokrasi tidak hanya terletak pada penyelenggaraan pemilu yang kompetitif, tetapi juga pada kemampuan partai politik membangun institusi yang demokratis, akuntabel, dan berkelanjutan. Sedang menurut Mietzner bahwa tantangan demokrasi Indonesia terlihat dari melemahnya institusi demokrasi dan meningkatnya praktik politik yang mempersempit ruang kompetisi demokratis (Mietzner, 2020).

Menjelang Pemilu 2029, reformasi partai politik menjadi semakin mendesak. Partai politik tidak cukup berorientasi pada kemenangan elektoral, tetapi juga harus memperkuat kapasitas kelembagaan agar mampu menghasilkan kader berkualitas, menjalankan fungsi representasi, dan meningkatkan kepercayaan publik. Salah satu tantangan utama reformasi tersebut adalah lemahnya demokrasi internal. Dominasi *elite* dalam pengambilan keputusan membatasi partisipasi anggota serta berpotensi memicu konflik dan fragmentasi organisasi. Padahal, demokrasi internal merupakan indikator penting penerapan nilai-nilai demokrasi dalam tata kelola partai politik. Kondisi ini memperkuat ketergantungan partai pada figur, elite, dan kepentingan jangka pendek sehingga menghambat proses institusionalisasi partai politik.

Tantangan berikutnya adalah sistem kaderisasi dan rekrutmen politik. Idealnya, partai politik merekrut pemimpin melalui mekanisme yang terbuka, transparan, dan berbasis merit. Namun, praktik politik di Indonesia masih dipengaruhi oleh popularitas, patronase, dan kekuatan finansial, sehingga belum sepenuhnya menghasilkan kader yang berkapasitas, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik. Namun, dalam perkembangan demokrasi Indonesia, partai politik masih menghadapi berbagai persoalan seperti lemahnya demokrasi internal, dominasi *elite*, persoalan kaderisasi, dan rendahnya transparansi organisasi (Berenschot, 2019; Aspinall et al, 2020).

Selain persoalan internal organisasi, transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik juga menjadi tantangan penting dalam reformasi partai politik.

Ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu dapat memengaruhi independensi partai dan membuka peluang berkembangnya praktik politik transaksional. Oleh karena itu, penguatan sistem pendanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi salah satu aspek penting dalam membangun tata kelola partai politik yang sehat dan demokratis.

Perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi partai politik. Perubahan pola komunikasi masyarakat menuntut partai beradaptasi melalui digitalisasi komunikasi, pendidikan politik, dan tata kelola organisasi. Partai yang gagal bertransformasi berisiko kehilangan relevansi di tengah perubahan perilaku politik masyarakat.

Berdasarkan berbagai tantangan tersebut, reformasi partai politik perlu dipahami sebagai penguatan kelembagaan yang komprehensif. Reformasi tidak hanya mencakup penyempurnaan regulasi, tetapi juga penguatan demokrasi internal, profesionalisasi kader, transparansi tata kelola, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan dinamika politik.

Dengan demikian, reformasi partai politik menuju Pemilu 2029 memerlukan pendekatan yang terintegrasi dalam penguatan kelembagaan. Untuk itu, penelitian ini menawarkan Model PENTA (Penguatan Tata Kelola Partai Politik) yang mengintegrasikan demokrasi internal, rekrutmen berbasis merit, transparansi dan akuntabilitas pendanaan, digitalisasi tata kelola, serta pendidikan politik berkelanjutan sebagai strategi memperkuat institusi partai politik dan kualitas demokrasi Indonesia.

Problematika Kelembagaan Partai Politik Indonesia dalam Perspektif Demokrasi dan Institusionalisasi

Kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh penyelenggaraan pemilu, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan partai politik sebagai pilar utama demokrasi. Sebagai penghubung antara masyarakat dan negara, partai yang memiliki kelembagaan lemah akan memengaruhi kualitas representasi, partisipasi politik, dan kepercayaan publik. Menurut North (1990), kelembagaan yang kuat ditandai oleh aturan yang jelas, stabilitas organisasi, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Namun, dalam praktik politik Indonesia, pengambilan keputusan masih cenderung didominasi elite sehingga membatasi partisipasi

anggota dan melemahkan demokrasi internal.

Dalam perspektif demokrasi, Robert A. Dahl menegaskan bahwa demokrasi mensyaratkan partisipasi dan kompetisi yang terbuka. Prinsip tersebut juga berlaku dalam tata kelola internal partai, sehingga organisasi yang lebih demokratis akan memiliki legitimasi dan akuntabilitas yang lebih kuat. Selanjutnya dalam perspektif institusionalisasi, Samuel P. Huntington menyatakan bahwa organisasi politik yang kuat ditandai oleh kemampuan beradaptasi, stabilitas organisasi, kemandirian, dan kohesi internal. Sejalan dengan itu, Angelo Panebianco menekankan bahwa kekuatan partai ditentukan oleh profesionalisme organisasi, kejelasan aturan internal, dan regenerasi kepemimpinan. Ketergantungan pada figur tertentu menunjukkan bahwa proses pelebagaan partai belum berjalan secara optimal.

Dalam konteks Indonesia, persoalan institusionalisasi masih terlihat dari personalisasi kepemimpinan, konflik *elite*, lemahnya kaderisasi, dan tingginya ketergantungan pada tokoh tertentu. Kondisi tersebut menjadikan organisasi rentan terhadap konflik internal dan menurunkan efektivitas fungsi representasi politik. Selain itu, Katz dan Mair melalui konsep *cartel party* menjelaskan bahwa partai politik cenderung semakin dekat dengan negara dan semakin jauh dari basis sosialnya. Akibatnya, partai berisiko kehilangan fungsi representasi karena lebih berorientasi pada kepentingan elite daripada aspirasi masyarakat.

Berdasarkan perspektif demokrasi dan institusionalisasi, tantangan utama partai politik Indonesia tidak hanya terletak pada kompetisi elektoral, tetapi juga pada penguatan kelembagaan yang demokratis, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, reformasi partai perlu diarahkan pada penguatan demokrasi internal, rekrutmen berbasis merit, transparansi pendanaan, digitalisasi tata kelola, dan pendidikan politik berkelanjutan. Kelima aspek tersebut menjadi landasan konseptual Model PENTA (Penguatan Tata Kelola Partai Politik) sebagai strategi memperkuat institusi partai politik dan konsolidasi demokrasi menuju Pemilu 2029.

Strategi Reformasi Partai Politik dalam Memperkuat Demokrasi Indonesia Menuju Pemilu 2029

Reformasi partai politik merupakan prasyarat penting dalam memperkuat kualitas demokrasi

Indonesia menjelang Pemilu 2029. Penguatan demokrasi tidak hanya bergantung pada penyelenggaraan pemilu yang kompetitif, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan partai politik dalam menjalankan fungsi representasi, kaderisasi, dan pendidikan politik secara efektif.

Strategi pertama adalah penguatan demokrasi internal melalui mekanisme pengambilan keputusan yang lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel guna mengurangi dominasi *elite* serta memperkuat legitimasi organisasi. Strategi kedua ialah perbaikan kaderisasi dan rekrutmen politik berbasis merit. Seleksi kader perlu didasarkan pada kompetensi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan sehingga partai tidak hanya berfungsi sebagai mesin elektoral, tetapi juga sebagai lembaga penghasil pemimpin berkualitas. Strategi ketiga adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik. Tata kelola keuangan yang terbuka dan akuntabel penting untuk menjaga independensi partai, mencegah politik transaksional, dan meningkatkan kepercayaan publik. Strategi keempat ialah transformasi digital tata kelola partai melalui pemanfaatan teknologi untuk memperkuat komunikasi politik, meningkatkan partisipasi anggota, dan memperluas pendidikan politik sehingga partai lebih adaptif terhadap perubahan perilaku politik masyarakat. Strategi kelima adalah penguatan pendidikan politik sebagai fungsi utama partai dalam meningkatkan literasi demokrasi, partisipasi warga negara, dan hubungan yang lebih erat antara partai dengan masyarakat.

Kelima strategi tersebut menunjukkan bahwa reformasi partai politik harus dilakukan secara terintegrasi melalui penguatan demokrasi internal, meritokrasi, transparansi pendanaan, digitalisasi organisasi, dan pendidikan politik. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat kelembagaan partai sehingga demokrasi Indonesia tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga semakin substantif.

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini merumuskan Model PENTA (Penguatan Tata Kelola Partai Politik) sebagai kerangka konseptual yang mengintegrasikan kelima strategi tersebut untuk memperkuat kelembagaan partai politik dan mendukung konsolidasi demokrasi Indonesia menuju Pemilu 2029.

Model PENTA: Penguatan Tata Kelola Partai Politik Menuju Pemilu 2029

Hasil analisis terhadap berbagai persoalan kelem-

bagaan partai politik menunjukkan bahwa reformasi partai politik tidak dapat hanya diarahkan pada peningkatan kapasitas elektoral, tetapi harus mencakup penguatan tata kelola organisasi secara menyeluruh. Partai politik sebagai institusi demokrasi membutuhkan kemampuan untuk membangun organisasi yang demokratis, profesional, transparan, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan politik. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan menjadi prasyarat penting agar partai politik tidak hanya berfungsi sebagai peserta pemilu, tetapi juga mampu menjalankan fungsi representasi, kaderisasi, dan pendidikan politik secara berkelanjutan.

Berdasarkan sintesis teori demokrasi, institusionalisasi partai politik, serta konsep tata kelola organisasi politik, penelitian ini mengembangkan Model PENTA (Penguatan Tata Kelola Partai Politik) sebagai kerangka konseptual reformasi kelembagaan partai politik menuju Pemilu 2029. Model ini dibangun atas asumsi bahwa kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi politik yang menjalankan fungsi representasi masyarakat. Dengan demikian, reformasi partai politik harus dimulai dari pembenahan kapasitas internal organisasi.

Secara teoritis, Model PENTA berangkat dari pandangan Huntington mengenai pentingnya institusionalisasi organisasi politik melalui stabilitas, adaptasi, dan kohesi internal. Selain itu, pemikiran Panebianco mengenai profesionalisasi organisasi partai menegaskan bahwa partai yang kuat tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan elektoral, tetapi juga oleh kemampuan membangun struktur internal yang stabil, aturan organisasi yang jelas, dan mekanisme regenerasi kepemimpinan yang berkelanjutan.

Model PENTA dikembangkan berdasarkan pemahaman bahwa kelemahan utama partai politik Indonesia tidak hanya terletak pada kompetisi politik, tetapi juga pada persoalan tata kelola internal. Dominasi elite, lemahnya demokrasi internal, rendahnya kualitas kaderisasi, keterbatasan transparansi pendanaan, serta belum optimalnya adaptasi digital menunjukkan perlunya suatu model reformasi yang bersifat integratif.

Secara konseptual, istilah **PENTA** digunakan untuk menggambarkan lima dimensi utama yang menjadi fondasi penguatan tata kelola partai politik, yaitu:

Tabel 1. Model PENTA

Dimensi	Konsep Utama	Makna dalam Penguatan Kelembagaan
P – Participation	Demokrasi Internal Partai	Memperkuat keterlibatan anggota, keterbukaan pengambilan keputusan, dan akuntabilitas kepemimpinan
E – Ethics & Accountability	Transparansi dan Akuntabilitas Pendanaan	Mendorong tata kelola keuangan yang terbuka, bertanggung jawab, dan bebas konflik kepentingan
N – Networking & Digitalization	Digitalisasi Tata Kelola Organisasi	Meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, komunikasi politik, dan partisipasi anggota
T – Talent Development	Rekrutmen Politik Berbasis Merit	Menghasilkan kader dan pemimpin politik berdasarkan kompetensi, integritas, dan kapasitas
A – Awareness	Pendidikan Politik Berkelanjutan	Memperkuat literasi politik masyarakat dan hubungan partai dengan warga negara

Kelima dimensi tersebut tidak berdiri secara terpisah, tetapi membentuk suatu sistem penguatan kelembagaan yang saling mendukung. Demokrasi internal menjadi dasar bagi terciptanya organisasi yang partisipatif, sementara sistem rekrutmen berbasis merit memastikan keberlanjutan kepemimpinan politik. Transparansi pendanaan memperkuat legitimasi organisasi, digitalisasi meningkatkan kemampuan adaptasi partai, dan pendidikan politik memperkuat hubungan antara partai dengan masyarakat.

Dalam perspektif institusionalisasi partai politik, Model PENTA memberikan kontribusi konseptual dengan menempatkan tata kelola internal sebagai faktor utama dalam membangun organisasi politik yang berkelanjutan. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang banyak melihat partai politik dari perspektif elektoral, Model PENTA menekankan bahwa kekuatan partai politik juga ditentukan oleh kapasitas organisasi dalam membangun sistem internal yang demokratis, transparan, dan profesional.

Dengan demikian, Model PENTA dapat dipahami sebagai suatu kerangka konseptual yang menghubungkan reformasi tata kelola partai politik dengan penguatan demokrasi Indonesia. Model ini menawarkan pendekatan integratif yang menggabungkan aspek organisasi, kepemimpinan, transparansi, teknologi, dan pendidikan politik sebagai strategi memperkuat institusionalisasi partai politik menuju Pemilu 2029.

Kontribusi Konseptual Model PENTA

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan Model PENTA sebagai model konseptual penguatan kelembagaan partai politik. Model ini memberikan perspektif baru bahwa reformasi partai politik tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi atau peningkatan strategi elektoral, tetapi membutuhkan transformasi tata kelola internal organisasi.

Melalui lima dimensi utama tersebut, Model PENTA menawarkan pendekatan yang menem-

patkan partai politik sebagai institusi demokrasi yang harus terus beradaptasi terhadap perubahan sosial, teknologi, dan tuntutan masyarakat. Dengan demikian, Model PENTA diharapkan dapat menjadi alternatif kerangka analisis maupun strategi kebijakan dalam memperkuat kualitas demokrasi Indonesia menuju Pemilu 2029.

Implikasi Model PENTA terhadap Konsolidasi Demokrasi Indonesia

Model PENTA memiliki implikasi strategis terhadap proses konsolidasi demokrasi Indonesia, khususnya dalam menghadapi dinamika politik menuju Pemilu 2029. Konsolidasi demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang kompetitif, tetapi juga oleh kemampuan institusi politik dalam membangun tata kelola yang demokratis, stabil, dan memperoleh legitimasi masyarakat. Dalam perspektif demokrasi modern, kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh keberadaan institusi politik yang mampu menjalankan fungsi representasi, agregasi kepentingan, dan pembentukan kepemimpinan secara efektif (Diamond, 1999).

Implikasi pertama Model PENTA adalah penguatan demokrasi internal partai politik. Melalui dimensi *Participation*, Model PENTA menempatkan keterlibatan anggota, keterbukaan mekanisme pengambilan keputusan, serta akuntabilitas kepemimpinan sebagai unsur penting dalam membangun organisasi partai yang demokratis. Penguatan demokrasi internal dapat mengurangi dominasi *elite*, memperluas ruang partisipasi anggota, dan menciptakan mekanisme regenerasi kepemimpinan yang lebih sehat. Hal ini sejalan dengan pandangan Dahl bahwa demokrasi membutuhkan ruang partisipasi dan kompetisi yang terbuka, tidak hanya dalam sistem politik nasional tetapi juga dalam organisasi politik itu sendiri (Dahl, 1971).

Implikasi kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas kepemimpinan politik melalui dimensi *Talent Development*. Model PENTA menekankan bahwa partai politik perlu mengembangkan sistem rekrutmen dan kaderisasi berbasis merit dengan mempertimbangkan kompetensi, integritas, serta kapasitas kepemimpinan. Sistem kaderisasi yang kuat akan mengurangi ketergantungan partai terhadap figur tertentu sekaligus memperkuat institusionalisasi organisasi. Menurut Panebianco, partai politik yang memiliki struktur organisasi dan mekanisme regenerasi yang jelas akan lebih mampu mempertahankan keberlanjutan organi-

sasi dibandingkan partai yang bergantung pada kekuatan personal *elite* (Panebianco, 1988).

Implikasi ketiga adalah meningkatnya legitimasi publik melalui penguatan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Dimensi *Ethics & Accountability* dalam Model PENTA menegaskan pentingnya pengelolaan pendanaan politik yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi pendanaan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga independensi partai, mengurangi praktik politik transaksional, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Dalam konteks demokrasi, legitimasi partai politik sangat dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap integritas dan akuntabilitas organisasi (Norris, 2011).

Implikasi keempat adalah kemampuan adaptasi partai politik terhadap perkembangan teknologi dan perubahan pola komunikasi politik masyarakat. Melalui dimensi *Networking & Digitalization*, Model PENTA mendorong partai politik untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana memperluas partisipasi politik, meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, serta membangun tata kelola organisasi yang lebih efektif. Transformasi digital menjadi kebutuhan penting karena perilaku politik masyarakat semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan ruang komunikasi digital.

Implikasi kelima adalah penguatan fungsi pendidikan politik melalui dimensi *Awareness*. Partai politik tidak hanya berperan sebagai kendaraan elektoral untuk memperoleh kekuasaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Pendidikan politik yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap demokrasi, memperkuat partisipasi warga negara, serta memperkecil jarak hubungan antara partai politik dan konstituen. Fungsi pendidikan politik tersebut merupakan salah satu aspek penting dalam memperkuat budaya demokrasi yang berkelanjutan (Almond & Verba, 1963).

Secara keseluruhan, Model PENTA menunjukkan bahwa konsolidasi demokrasi Indonesia membutuhkan pendekatan yang melampaui aspek prosedural pemilu. Demokrasi yang berkualitas membutuhkan partai politik yang memiliki kapasitas kelembagaan, sistem organisasi yang demokratis, kepemimpinan yang profesional, tata kelola yang transparan, serta kemampuan beradaptasi

terhadap perubahan sosial dan teknologi. Dengan demikian, Model PENTA memberikan kontribusi konseptual bahwa penguatan demokrasi Indonesia dapat dimulai melalui reformasi internal partai politik sebagai institusi utama dalam sistem demokrasi. Berdasarkan implikasi tersebut, Model PENTA dapat dipahami bukan hanya sebagai model penguatan organisasi partai politik, tetapi juga sebagai strategi konseptual dalam mendukung konsolidasi demokrasi Indonesia menuju Pemilu 2029. Melalui integrasi lima dimensi utama, yaitu demokrasi internal, rekrutmen berbasis merit, transparansi pendanaan, digitalisasi tata kelola, dan pendidikan politik berkelanjutan, Model PENTA menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam membangun partai politik yang demokratis, profesional, dan berkelanjutan.

Berbeda dengan kajian sebelumnya yang lebih banyak melihat partai politik melalui perspektif elektoral dan kompetisi kekuasaan, Model PENTA menawarkan pendekatan integratif yang menempatkan tata kelola internal sebagai variabel utama dalam memperkuat institusionalisasi partai politik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan demokrasi Indonesia menuju Pemilu 2029 bergantung pada keberhasilan reformasi kelembagaan partai politik. Tantangan utama yang masih dihadapi meliputi lemahnya demokrasi internal, dominasi elite, rendahnya kualitas kaderisasi, terbatasnya transparansi tata kelola, serta belum optimalnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi partai politik harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan kapasitas elektoral, tetapi juga pada penguatan kelembagaan yang demokratis, profesional, dan berkelanjutan.

Sebagai kontribusi konseptual, penelitian ini menawarkan Model PENTA (Penguatan Tata Kelola Partai Politik) yang mengintegrasikan lima dimensi utama, yaitu demokrasi internal, rekrutmen politik berbasis merit, transparansi dan akuntabilitas pendanaan, digitalisasi tata kelola, serta pendidikan politik berkelanjutan. Model ini memperluas kajian reformasi partai politik dengan menempatkan tata kelola kelembagaan sebagai fondasi penguatan institusi partai dan konsolidasi demokrasi Indonesia menuju Pemilu 2029.

Penguatan partai politik menuju Pemilu 2029 perlu menjadi agenda strategis melalui reformasi kelembagaan yang menekankan demokrasi internal, rekrutmen politik berbasis merit, transparansi pendanaan, digitalisasi tata kelola, dan pendidikan politik berkelanjutan. Upaya tersebut memerlukan sinergi antara partai politik, pemerintah, penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, dan kalangan akademisi guna memperkuat tata kelola politik yang demokratis, akuntabel, dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian selanjutnya perlu menguji secara empiris Model PENTA melalui studi kasus, survei, atau analisis komparatif antarpolitical politik untuk mengevaluasi efektivitas model dalam memperkuat institusionalisasi partai dan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

REFERENSI

- Aspinall, E., Fossati, D., Muhtadi, B. and Warburton, E. 2020, 'Elites, masses, and democratic decline in Indonesia', *Democratization*, 27(4), pp. 505–526.
- Bennett, W.L. and Livingston, S. 2020, *The disinformation age: Politics, technology, and disruptive communication*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Budiardjo, M. 2019, *Dasar-dasar ilmu politik*. Edisi revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J.W. and Creswell, J.D. 2018, *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. 5th edn. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dahl, R.A. 1971, *Polyarchy: Participation and opposition*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Dahl, R.A. 1989, *Democracy and its critics*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Diamond, L. 1999, *Developing democracy: Toward consolidation*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
- Fossati, D. 2021, 'The resurgence of authoritarian practices in Indonesia's democracy', *Journal of Contemporary Asia*, 51(1), pp. 1–20.
- Hanan, D. 2020, 'Making sense of Indonesia's democratic regression', *Asian Journal of Political Science*, 28(3), pp. 257–276.
- Huntington, S.P. 1968, *Political order in changing societies*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Katz, R.S. and Mair, P. 2009, 'The cartel party thesis: A restatement', *Perspectives on Politics*, 7(4), pp. 753–766.
- Krippendorff, K. 2018, *Content analysis: An introduction to its methodology*. 4th edn. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Krouwel, A. 2019, 'Party organizations and democratic change: The transformation of political parties in modern democracies', *Party Politics*, 25(6), pp. 757–769.
- LaPalombara, J. and Weiner, M. 1966, *Political parties and political development*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Mainwaring, S. 1999, *Rethinking party systems in the third wave of democratization: The case of Brazil*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Mietzner, M. 2020, 'Authoritarian innovations in Indonesia: Electoral narrowing, identity politics and executive power', *Democratization*, 27(6), pp. 1021–1038.
- Morlino, L. 2012, *Changes for democracy: Actors, structures, processes*. Oxford: Oxford University Press.
- Nazir, M. 2014, *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Neumann, S. 1956, *Modern political parties*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- North, D.C. 1990, *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Panebianco, A. 1988, *Political parties: Organization and power*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Persily, N. and Tucker, J.A. 2020, *Social media and democracy: The state of the field, prospects for reform*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Power, T.P. and Warburton, E. 2020, 'The decline of Indonesian democracy: Explaining the weakening of democratic institutions', *Journal of Democracy*, 31(3), pp. 124–138.
- Republik Indonesia, 2008, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*.
- Republik Indonesia, 2011, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*.

- Sartori, G. 1976, *Parties and party systems: A framework for analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Scarrow, S.E. 2005, *Political parties and democracy in theoretical and practical perspectives: Implementing intra-party democracy*. Washington, DC: National Democratic Institute.
- Scarrow, S.E., Webb, P.D. and Poguntke, T. 2017, *Organizing political parties: Representation, participation, and power*. Oxford: Oxford University Press.
- van Biezen, I. and Kopecký, P. 2007, 'The state and the parties: Public funding, public regulation and rent-seeking in contemporary democracies', *Party Politics*, 13(2), pp. 235–254.
- Warburton, E. and Aspinall, E. 2019, 'Explaining Indonesia's democratic regression: Structure, agency and popular opinion', *Contemporary Southeast Asia*, 41(2), pp. 255–285.